



GAGASAN TENTANG KELEMBAGAAAN BRIN

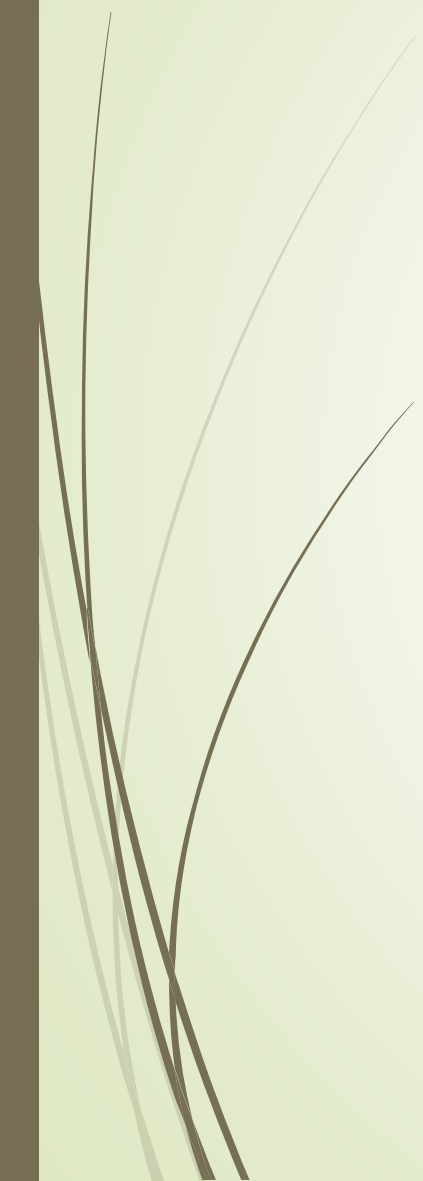
OLEH SUDHARTO P.HADI

BAHAN FGD LINTAS KOMTEK DRN

JAKARTA, 19 NOVEMBER 2019



SISTEMATIKA PRESENTASI

- ISSU-ISSU IPTEK
 - UU 11 TH 2019
 - KELEMBAGAAN BRIN
 - POSISI DAN PERAN DRN
- 



ISU-ISU IPTEK

- KEMANA ANGGARAN RP 26 TRILYUN? = BELUM MENAMPAKKAN HASILNYA
- HASIL-HASIL RISET BERHENTI DI PROTOTYPE, PATENT, PUBLIKASI
- AGENDA RISET TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENGGUNA
- INDUSTRI/ USERS MENGADOPSI INOVASI YANG BERLISENSI DARI NEGARA LAIN
- RISET BERBAGAI LEMBAGA LITBANG K/L, PERGURUAN TINGGI TDK TERKOORDINASI, TUMPANG TINDIH, DUPLIKASI

Strategic Issue of Science Technology and Innovation (STI) Development

Situation Analysis

- STI contribution to economic growth is low, TFP contribution only 0,9% from total of economic growth Indonesia's
- exports still dominated by low complexity product
- Environmental degradation threaten the sustainable development



Utilization of Science and Technology for Sustainable Economic Growth

- Global Innovation Index Score (GII) in 2018 is 29,8 (rank 85 from 126 countries)
- HR (Human Resource) Percentage with Doctor/PhD qualification (S3 education level) only 14,08%
- Number of international publication which can be cited, came to 72.146 (rank 52 from 239 countries)
- Capacity of Science Technology infrastructure still insufficient



Increased capability adoption of Technology and Innovation

- Results of innovation research can't be fully converted to commercial product
- Triple-helix partnership in STP still needs to be strengthened



Creation of Innovation Ecosystem

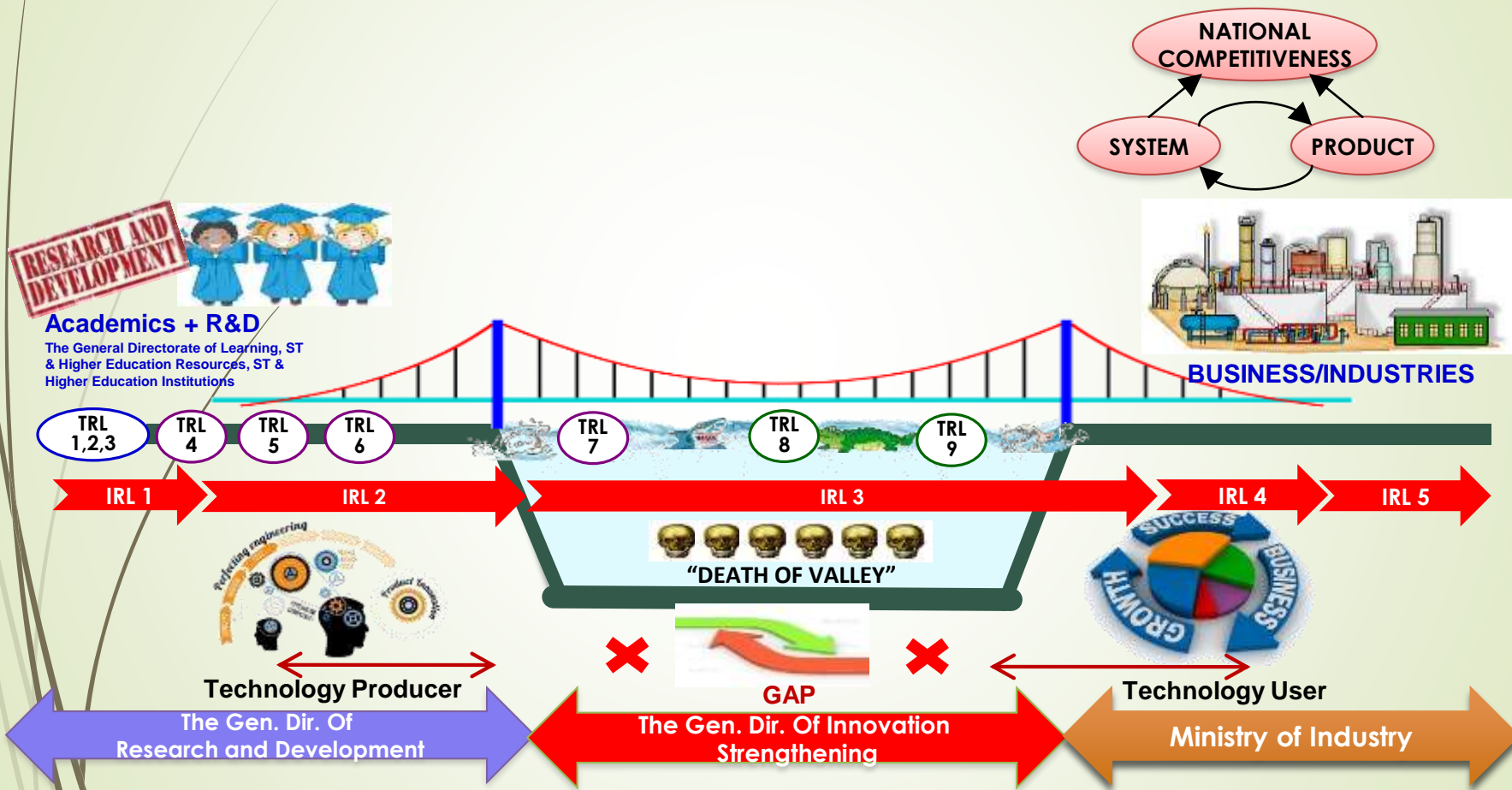
- R&D Budget just reached 30,78 trillion rupiah or around 0,25% of GDP and spread to various Ministries/Institutions
- 81% source of research and development budget, is from Government



Increased effectiveness of STI Budget Utilization

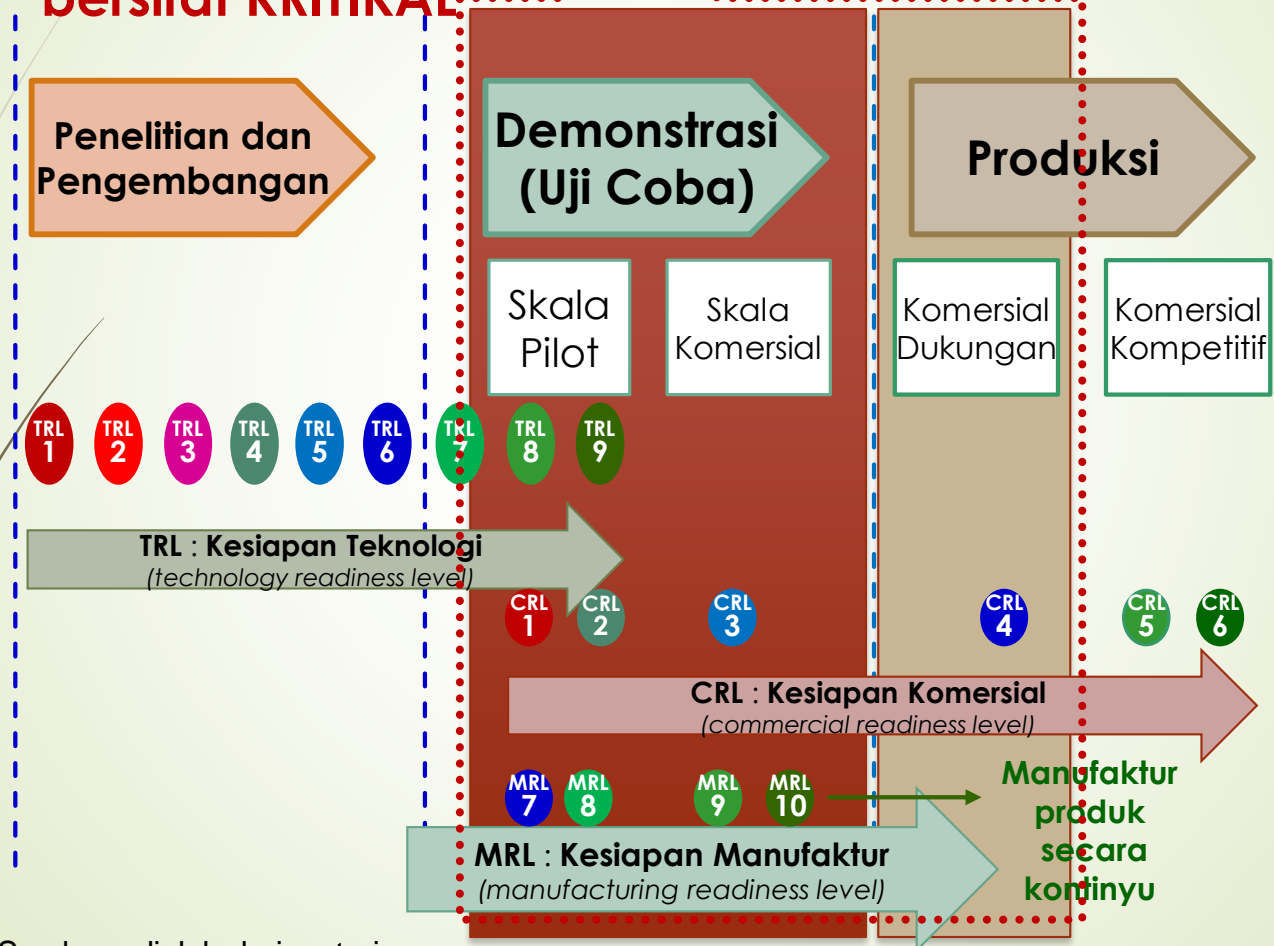
STRATEGY :

Encouraging Research To Strengthening Innovations And Competitiveness



Menemukenali “LEMBAH KEMATIAN” dalam UPAYA Hilirisasi Hasil Litbang dan Inovasi

Area yang
bersifat KRITIKAL



Sumber : diolah dari materi presentasi AIPI



PASAL 48, UU 11 TH 2019

- ▶ UNTUK MENJALANKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN SERTA INVENSI DAN INOVASI TERINTEGRASI DIBENTUK BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
- ▶ BRIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBENTUK PRESIDEN
- ▶ KETENTUAN MENGENAI BRIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN



BRIN

- MERGER LEMBAGA RISET DAN LITBANG KEMENTERIAN/ LEMBAGA?
- *HOLDING RESEARCH INSTITUTE*
- MENSINERGIKAN SUMBER DAYA RISET, IPTEK, INOVASI YANG TERSEBAR, TERPECAH DAN TUMPANG TINDIH
- ORIENTASI PEMECAHAN MASALAH
- MERUMUSKAN KEBIJAKAN IPTEK YG FOKUS, TERARAH, TERBANGUN KERJASAMA SINERGIS
- MENGATUR ALOKASI DAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA IPTEK AGAR TEPAT SASARAN
- PENGUATAN IPTEK DAN INOVASI =INDONESIA MAJU YANG BERDAYA SAING

UNDANG NO 11 TAHUN 2019 TENTANG SISNAS IPTEK

TUJUAN SISNAS IPTEK (PASAL 3):

- ❑ **MEMAJUKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN IPTEK YANG MENGHASILKAN *INVENSI* DAN *INOVASI*;**
- ❑ **MENINGKATKAN INTENSITAS DAN KUALITAS INTERAKSI, KEMITRAAN, *SINERGI* ANTAR *UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN IPTEK*;**
- ❑ **MENINGKATKAN PEMANFAATAN IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN, *KUALITAS HIDUP* DAN *KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*; DAN**
- ❑ **MENINGKATKAN *KEMANDIRIAN*, *DAYA SAING BANGSA* DAN *DAYA TARIK BANGSA* DALAM RANGKA MEMAJUKAN PERADABAN BANGSA MELALUI PERGAULAN INTERNASIONAL.**

RENCANA INDUK PEMAJUAN IPTEK

Untuk Mewujudkan Tujuan Nasional Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pemanfaatan Iptek

Rencana Induk pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana induk pemanfaatan Iptek wajib dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Iptek

U.U No 11/2019, pasal 8



PASAL 9, UU 11 TH 2019

- (1) RENCANA INDUK PEMAJUAN IPTEK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 8 DISUSUN OLEH PEMERINTAH PUSAT
- (2) PEMERINTAH PUSAT DALAM MENYUSUN RENCANA INDUK IPTEK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERKOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DRN, BRIN,
Lembaga Riset,
Litbang K/L, PT,
Pelaku Usaha

BRIN

Rencana
Induk
Pemajuan
IPTEK

-BPPT, BATAN,
BAPETEN, LIPI,
BSN, LAPAN
-Litbang K/L
-LPPM PT

RISET

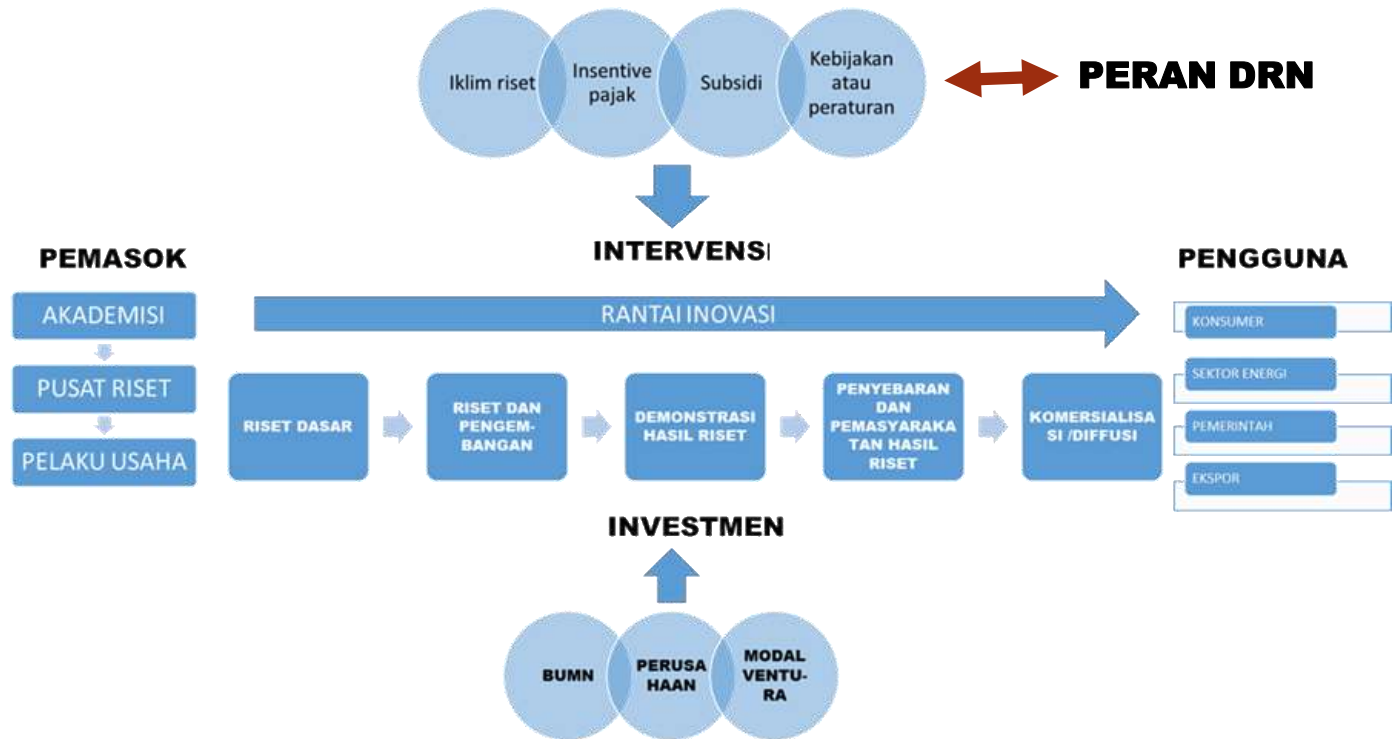
Riset &
Pengembangan

Demonstrasi Hasil
Riset

Penyebaran &
Pemasyarakatan Hasil
Riset

Komersialisasi /
Difusi

INOVASI



POSISI DRN DALAM UU 11/2019

- 1. UU NO 11/ 2019 MERUPAKAN PENGGANTI UU 18/ 2002. POSISI DRN, SAMA DENGAN SEMUA LEMBAGA LPNK, TIDAK TERTULIS DALAM UU NO.11/2019,DAN MASIH TETAP BERFUNGSI KARENA PASAL 98 UU 11/2019 MENETAPKAN BAHWA SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2002 DINYATAKAN MASIH TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG INI. DRN DIBENTUK DENGAN PERPRES NO 16 TAHUN 2005**
- 2. BEBERAPA OPSI EKSISTENSI DRN ADALAH :**
 - A. - BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL MEMBUTUHKAN DEWAN PENGARAH**
 - DEWAN PENGARAH DIUSULKAN ANGGOTA DRN PERIODE 2019-2022, NAMANYA MENJADI DEWAN PENGARAH RISET DAN INOVASI NASIONAL (DEPRIN)**
 - C. KETUA DEPRIN ADALAH PRESIDEN**
 - D. POSISI DEPRIN DIBAWAH WAPRES DIATAS MENTERI**
 - E. TUGAS DEPRIN ADALAH :**
 - E.1 MEMBANTU PRESIDEN MENYUSUN RENCANA INDUK PEMAJUAN IPTEK**
 - E.2 MEMBANTU PRESIDEN MENINGKATKAN KAPASITAS INOVASI NASIONAL**
- 3. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, DEPRIN MEMILIKI PENDUKUNG : STAF KHUSUS, MEMBENTUK DEWAN PAKAR, MEMBENTUK SATGAS SUS.**



PASAL 9, UU 11 TH 2019

- (1) RENCANA INDUK PEMAJUAN IPTEK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 8 DISUSUN OLEH PEMERINTAH PUSAT
- (2) PEMERINTAH PUSAT DALAM MENYUSUN RENCANA INDUK IPTEK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERKOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

SEBAGAI KOMPARASI

UU 18 TAHUN 2002, pasal 19 ayat 2:

- ▶ UNTUK **MENDUKUNG MENTERI** DALAM MERUMUSKAN ARAH, PRIORITAS UTAMA DAN KERANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK, **PEMERINTAH MEMBENTUK DEWAN RISET NASIONAL** YANG BERANGGOTAKAN MASYARAKAT DARI UNSUR KELEMBAGAAN IPTEK.

KEPMEN 171/2019, FOKUS TUGAS DRN : MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD MENTERI DLM

- ▶ PENYUSUNAN PRN
- ▶ PERUMUSAN ARAH DAN PRIORITAS UTAMA PEMB IPTEK
- ▶ PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL IPTEK, SINAS
- ▶ PEMANTAUAN PERKEMB IPTEK DAN KEBUTUHAN IPTEK UTK PEMB.
- ▶ MENJALIN KEMITRAAN DG DRD, DEWAN2 SEJENIS TK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL



DAFTAR BACAAN

- JUMAIN APPE. IMPROVING THE QUALITY OF RESEARCH AND INNOVATION IN EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, AND ARTS IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0. KEY NOTE SPEECH AT ICERI, UNY YOGYAKARTA, OCTOBER 24, 2019
 - LUKMAN HAKIM. 2019. PARADIGMA BRIN KEDEPAN. KOMPAS, 12 NOVEMBER 2019
 - SANTOSA YUDO WARSONO. 2018. PROGRAM INOVASI INDUSTRI. FGD DRN
 - U.U NO 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
- 